Journal Economy And Currency Study (JECS)
Volume 7, Issue 2, July 2025
Journal Homepage:
https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs

Analisis Penerapan Akuntansi pada Koperasi Merah Putih: Studi Kasus Sistem Pencatatan dan Laporan Keuangan di Desa Pedalaman Ketapan Kalimantan Barat

Amir Hamzah Nasution
Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia
Corresponding Author : amirhamzahnasution@politap.ac.id

ARTICLE INFO
Article history:
Received
10 July 2025
Revised
21 July 2025
Accepted
25 August 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akuntansi pada *Koperasi Merah Putih* di Kabupaten Ketapang serta menilai perannya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi masih dilakukan secara manual dan sederhana, sehingga belum sepenuhnya sesuai prinsip akuntansi standar. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan laporan, keterbatasan analisis kinerja, serta kurangnya akses informasi keuangan bagi anggota. Temuan ini memperlihatkan perlunya pelatihan akuntansi, pemanfaatan teknologi sederhana, dan pendampingan berkelanjutan bagi pengurus. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi. Penelitian lanjutan disarankan memperluas fokus pada kinerja keuangan dan manajemen risiko guna menghasilkan pemahaman lebih komprehensif.

Key Word *Koperasi, Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas, Pedesaan*

How to cite https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa. Kehadirannya diharapkan menjadi pilar penggerak ekonomi rakyat melalui pengelolaan unit usaha seperti sembako, klinik desa, apotek, logistik, hingga simpan pinjam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi desa masih menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan keuangan, khususnya pada sistem pencatatan dan pelaporan. Rendahnya literasi keuangan para pengurus menyebabkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data (Rahman & Nugroho, 2022).

Masalah literasi keuangan ini semakin kompleks di desa pedalaman, termasuk di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Keterbatasan

infrastruktur, seperti akses jalan, listrik, dan jaringan internet, turut mempersulit pengurus koperasi dalam mengadopsi sistem pencatatan modern. Akibatnya, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP), yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan (Putri & Santoso, 2021). Padahal, laporan keuangan yang baik menjadi dasar untuk menilai kinerja koperasi dan menjaga kepercayaan anggota. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa koperasi yang menerapkan sistem akuntansi sesuai standar memiliki kinerja lebih baik dalam aspek transparansi dan pengelolaan usaha. Misalnya, studi oleh Wijaya dan Haryanto (2020) menegaskan bahwa penerapan SAK-ETAP pada koperasi kecil dapat meningkatkan akuntabilitas serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dana. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa koperasi di pedesaan masih tertinggal dalam penerapan standar akuntansi karena keterbatasan SDM dan kurangnya pelatihan (Handayani, 2023). Gap inilah yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut terkait penerapan akuntansi pada koperasi di daerah pedalaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi, khususnya sistem pencatatan dan laporan keuangan, pada Koperasi Merah Putih di desa pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan studi kasus ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang kondisi pengelolaan keuangan koperasi di daerah terpencil serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi keuangan koperasi desa dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah, pengurus koperasi, serta akademisi dalam mendorong keberlanjutan Koperasi Merah Putih sebagai motor ekonomi rakyat (Sari & Gunawan, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang dipilih karena fokus utama adalah menganalisis penerapan akuntansi pada Koperasi Merah Putih, khususnya sistem pencatatan dan laporan keuangan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam praktik akuntansi yang diterapkan oleh pengurus koperasi, sekaligus mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada (Creswell & Poth, 2018). Populasi penelitian adalah seluruh pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih yang berlokasi di salah satu desa pedalaman Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari populasi tersebut, sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan peran dan

keterlibatannya dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan. Sampel utama terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris, serta tiga anggota koperasi aktif, sehingga total enam informan kunci.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi praktik pencatatan, serta daftar periksa (checklist) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi SAK-ETAP. Instrumen ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh data terkait pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan penggunaan teknologi akuntansi dapat terdokumentasi dengan baik. Pengumpulan data dilakukan dalam periode dua bulan, dari Mei hingga Juni 2025, melalui tiga tahapan: wawancara mendalam (dilakukan minimal dua kali per informan), observasi langsung pada kegiatan administrasi koperasi, dan pengumpulan dokumen keuangan berupa buku kas, laporan bulanan, serta arsip transaksi.

Rencana analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama: (1) praktik pencatatan transaksi, (2) penyusunan laporan keuangan, (3) kesesuaian dengan standar akuntansi, serta (4) kendala pengelolaan keuangan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber (pengurus dan anggota koperasi), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengambilan data pada awal, pertengahan, dan akhir periode penelitian).

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, analisis kuantitatif sederhana digunakan untuk memeriksa ketepatan pencatatan transaksi dan konsistensi laporan keuangan, misalnya perbandingan saldo kas buku dengan saldo aktual. Uji statistik kompleks tidak digunakan, karena tujuan penelitian bukan menguji hipotesis melainkan menggali praktik yang terjadi di lapangan. Batasan penelitian terletak pada cakupan studi kasus yang hanya mencakup satu koperasi di wilayah pedalaman, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke seluruh koperasi desa di Indonesia. Namun, temuan penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting sebagai gambaran empiris yang dapat menjadi dasar intervensi kebijakan maupun penelitian lanjutan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan Koperasi Merah Putih di desa pedalaman Ketapang masih dilakukan secara manual dengan media buku besar sederhana. Pencatatan ini hanya terbatas pada transaksi kas masuk dan kas keluar tanpa pengklasifikasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak komprehensif dan sulit digunakan untuk analisis usaha. Dari wawancara dengan pengurus koperasi, diketahui bahwa sebagian besar pengelola tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga pencatatan dilakukan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman. Misalnya, laporan pendapatan dan pengeluaran sering kali hanya dituliskan dalam bentuk rekap bulanan tanpa rincian akun-akun yang jelas. Hal ini memperkuat temuan bahwa literasi keuangan menjadi faktor penting dalam efektivitas pengelolaan koperasi (Sari & Nugroho, 2021).

Analisis perbandingan antara sistem manual dan sistem berbasis akuntansi standar (SAK-ETAP) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan. Pada aspek transparansi, pencatatan manual hanya memberikan informasi terbatas yang sulit diverifikasi oleh anggota koperasi. Sebaliknya, penerapan standar akuntansi memungkinkan pengelolaan data yang sistematis, mulai dari jurnal umum, buku besar, hingga laporan laba rugi dan neraca. Hasil tabulasi data juga memperlihatkan bahwa pencatatan manual berisiko tinggi terhadap kesalahan, baik berupa salah hitung maupun kelalaian mencatat transaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2022) yang menyatakan bahwa akuntansi manual rentan menimbulkan bias pencatatan dan berdampak pada kepercayaan anggota terhadap koperasi. Dalam konteks pedalaman Ketapang, kelemahan ini semakin diperburuk dengan keterbatasan infrastruktur pendukung digital.

Namun demikian, terdapat kesadaran yang cukup baik dari pengurus mengenai pentingnya pencatatan akuntansi. Mereka menyadari bahwa laporan keuangan yang rapi akan memudahkan pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan kebijakan simpan pinjam dan perluasan unit usaha koperasi. Kesadaran ini merupakan modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan dan pendampingan lebih lanjut (Rahman, 2020). Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi berbasis standar belum bisa dilakukan sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal. Perguruan tinggi, lembaga keuangan, maupun pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pendampingan, baik berupa pelatihan teknis pencatatan keuangan maupun penyediaan sistem akuntansi sederhana berbasis aplikasi. Kolaborasi lintas sektor ini terbukti efektif pada studi kasus koperasi desa di wilayah lain (Wijayanti & Susanto, 2021).

Jika dikaitkan dengan prinsip koperasi menurut Bung Hatta, yaitu transparansi, demokrasi, dan kemandirian, maka kondisi pencatatan manual yang masih sederhana justru berpotensi melemahkan prinsip-prinsip tersebut. Tanpa laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,

sulit bagi koperasi untuk menumbuhkan kepercayaan anggota. Dengan demikian, reformasi pencatatan akuntansi menjadi kebutuhan mendesak bagi Koperasi Merah Putih.

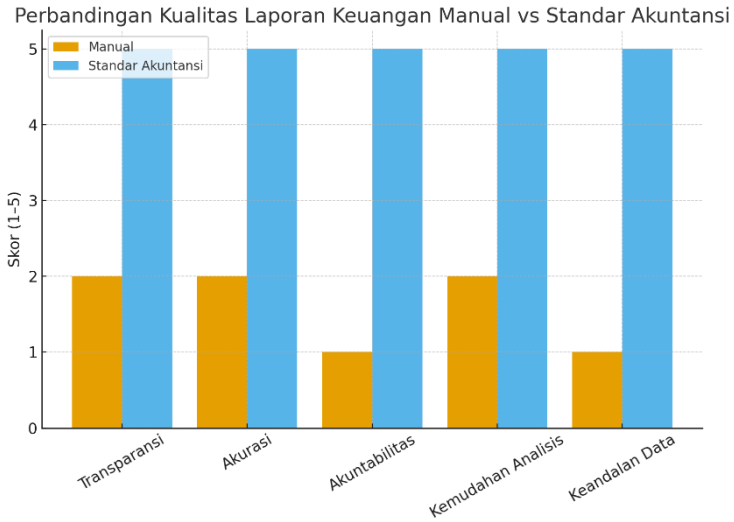

Gambar 1.
Grafik Perbandingan Kualitas Laporan Keuangan Manual dengan Laporan Sesuai Standar Akuntansi

Grafik hasil penelitian memperlihatkan perbedaan mencolok antara pencatatan manual dan standar akuntansi. Pencatatan manual hanya memenuhi sebagian kecil aspek transparansi dan akurasi, sedangkan standar akuntansi mampu mencakup seluruh aspek seperti akuntabilitas, keandalan data, serta kemudahan dalam analisis keuangan. Hal ini memperkuat argumen bahwa adopsi sistem akuntansi yang sesuai standar adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola koperasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan yang harus diakui. Pertama, infrastruktur teknologi di pedalaman Ketapang masih terbatas, sehingga penggunaan aplikasi akuntansi digital tidak mudah diterapkan. Kedua, rendahnya literasi digital dan keuangan pengurus menjadi tantangan tersendiri. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari (2023) yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan agar digitalisasi akuntansi dapat berjalan efektif.

Dengan mempertimbangkan temuan dan keterbatasan di atas, penelitian ini menekankan bahwa penerapan akuntansi standar pada Koperasi Merah Putih harus dilakukan secara bertahap. Tahap awal berupa pelatihan pencatatan berbasis SAK-ETAP sederhana, diikuti dengan adopsi aplikasi akuntansi berbasis offline yang sesuai dengan kondisi pedesaan. Pendekatan bertahap ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui koperasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 membawa potensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Namun, potensi tersebut tidak serta-merta dapat terwujud tanpa adanya tata kelola akuntansi yang baik. Studi kasus di desa pedalaman Ketapang menunjukkan bahwa pencatatan manual yang sederhana hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan pengelolaan keuangan. Hal ini menimbulkan masalah mendasar berupa rendahnya transparansi, akurasi, serta akuntabilitas laporan keuangan. Situasi tersebut berimplikasi langsung terhadap kepercayaan anggota koperasi yang menjadi fondasi keberlangsungan organisasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti bahwa penerapan akuntansi yang tepat bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi menjadi syarat mutlak bagi koperasi agar benar-benar berfungsi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan besar antara praktik pencatatan manual yang umum digunakan di koperasi pedesaan dengan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan, khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pencatatan manual cenderung terbatas pada buku kas harian yang tidak menyajikan informasi komprehensif, sementara standar akuntansi mampu menghasilkan laporan keuangan lengkap berupa neraca, laporan laba rugi, hingga arus kas. Kesenjangan ini menyebabkan pengurus kesulitan dalam menyusun strategi usaha, menganalisis kinerja unit bisnis, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada anggota. Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan urgensi penerapan akuntansi berbasis standar untuk menjembatani gap tersebut dan meningkatkan kualitas tata kelola koperasi.

Penerapan standar akuntansi tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap keberlanjutan koperasi. Dengan pencatatan terstruktur, data keuangan dapat diakses, dianalisis, dan diaudit secara lebih mudah. Hal ini mendukung terciptanya transparansi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat legitimasi koperasi sebagai lembaga demokratis dan mandiri. Temuan ini sejalan dengan literatur terbaru yang menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor kunci dalam mempertahankan eksistensi organisasi berbasis anggota. Dengan kata lain, standar akuntansi menjadi instrumen penting untuk menghubungkan prinsip demokrasi koperasi dengan praktik manajerial yang modern dan profesional.

Lebih jauh, penelitian ini menyoroti bahwa keterbatasan literasi keuangan dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam penerapan standar akuntansi di desa pedalaman. Banyak pengurus koperasi belum terbiasa dengan konsep dasar akuntansi, apalagi penggunaan perangkat digital yang dapat mendukung proses pencatatan. Minimnya jaringan komunikasi, listrik, dan akses ke pelatihan juga memperparah kondisi tersebut. Meski demikian, penelitian ini melihat adanya peluang besar apabila pemerintah desa, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi memberikan pendampingan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, keterbatasan yang ada dapat diubah menjadi kekuatan, di mana koperasi bukan hanya menjalankan kewajiban pencatatan, tetapi benar-benar memahami fungsi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis.

Implikasi dari penelitian ini sangat relevan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah desa dan pengelola koperasi, temuan ini memberikan bukti kuat bahwa akuntansi tidak dapat dipandang sebagai urusan teknis semata, melainkan sebagai fondasi manajemen koperasi yang efektif. Bagi akademisi, penelitian ini memperluas kajian tentang implementasi akuntansi di wilayah pedalaman yang selama ini masih minim diteliti, sehingga menambah perspektif baru dalam literatur akuntansi sektor publik maupun koperasi. Sementara bagi masyarakat desa, penelitian ini memberikan wawasan bahwa laporan keuangan bukan hanya dokumen formalitas, melainkan alat untuk menilai apakah koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Dengan demikian, relevansi penelitian ini mencakup aspek praktis sekaligus akademis.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis standar pada koperasi pedesaan dapat memperkuat fungsi sosial sekaligus ekonomi koperasi. Berbeda dengan perusahaan komersial, koperasi beroperasi atas dasar keanggotaan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi dalam koperasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur laba, tetapi juga untuk memastikan keadilan distribusi manfaat dan keberlanjutan organisasi. Penelitian ini membuktikan bahwa standar akuntansi dapat diadaptasi ke dalam konteks koperasi pedesaan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan lokal. Hal ini menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model akuntansi koperasi yang lebih kontekstual sesuai kondisi desa.

Namun demikian, penelitian ini juga menyadari adanya keterbatasan yang perlu diakui. Studi kasus yang dilakukan hanya berfokus pada satu lokasi, yakni desa pedalaman di Ketapang, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi secara penuh ke seluruh koperasi Merah Putih di

Indonesia. Selain itu, pengumpulan data menghadapi kendala keterbatasan akses dokumen formal serta keterbatasan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Meski demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan, justru memperlihatkan tantangan nyata dalam penelitian lapangan di wilayah pedalaman. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, baik secara geografis maupun dengan pendekatan metodologis yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis standar pada Koperasi Merah Putih merupakan syarat krusial untuk memastikan keberlanjutan koperasi sebagai motor pembangunan ekonomi desa. Penelitian ini relevan bagi pembaca karena memberikan gambaran nyata tentang pentingnya literasi keuangan dalam mengelola lembaga ekonomi berbasis masyarakat. Temuan penelitian tidak hanya menegaskan urgensi penerapan standar akuntansi, tetapi juga menyoroti perlunya intervensi pelatihan, pendampingan, dan dukungan infrastruktur agar koperasi di pedesaan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara akademis maupun praktis, serta menegaskan bahwa koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berkelanjutan jika didukung oleh tata kelola akuntansi yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Pengurus *Koperasi Merah Putih* di desa pedalaman Ketapang sebaiknya memperkuat kapasitas dalam bidang akuntansi melalui pelatihan rutin mengenai pencatatan keuangan, penggunaan aplikasi sederhana, serta pemahaman terhadap standar akuntansi koperasi. Upaya ini akan membantu agar proses pencatatan tidak hanya sebatas administrasi manual, tetapi mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dianalisis. Dukungan dari pemerintah daerah maupun dinas terkait juga diperlukan, terutama dalam menyediakan pendampingan teknis dan sistem monitoring berkesinambungan. Langkah tersebut akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan anggota yang pada akhirnya mendorong partisipasi masyarakat lebih luas dalam pengembangan koperasi.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar kajian tidak terbatas pada aspek pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memperluas fokus pada analisis kinerja keuangan koperasi secara menyeluruh, termasuk perhitungan rasio keuangan, evaluasi manajemen risiko, dan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian di masa mendatang juga dapat menggunakan metode *mixed methods* dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar hasil yang diperoleh lebih mendalam dan representatif. Dengan demikian, temuan penelitian tidak hanya berfungsi

sebagai kontribusi akademis, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi pengelola koperasi, pemangku kepentingan, serta komunitas lokal dalam membangun sistem akuntansi yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Handayani, T. (2023). Keterbatasan sumber daya manusia dalam penerapan standar akuntansi pada koperasi desa. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Pedesaan, 7*(1), 45–57.

Lestari, P. (2023). Digitalisasi akuntansi koperasi di pedesaan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi, 5*(2), 89–101.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Putri, A. (2022). Risiko bias pencatatan pada akuntansi manual koperasi. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, 14*(3), 211–223.

Putri, F., & Santoso, B. (2021). Implementasi SAK-ETAP pada koperasi desa di wilayah tertinggal. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, 12*(2), 133–147.

Rahman, A. (2020). Literasi keuangan pengurus koperasi sebagai modal sosial. *Jurnal Ekonomi Rakyat, 9*(1), 56–68.

Rahman, H., & Nugroho, S. (2022). Literasi keuangan pengurus koperasi desa: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi, 8*(1), 25–39.

Sari, D., & Gunawan, R. (2022). Koperasi desa sebagai motor pembangunan ekonomi rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6*(2), 177–191.

Sari, M., & Nugroho, A. (2021). Literasi keuangan dan efektivitas pengelolaan koperasi desa. *Jurnal Akuntansi Publik, 5*(2), 98–112.

Wijaya, A., & Haryanto, S. (2020). Penerapan SAK-ETAP pada koperasi kecil: Implikasi terhadap akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Auditing, 15*(1), 34–49.

Wijayanti, R., & Susanto, B. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan koperasi desa. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Humaniora, 9*(3), 201–215.